

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama bulan Mei-Juni dan analisa data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan luas garapan 3091 hektar yang dilakukan oleh anggota Gapoktan Hkm Wana Tani Lestari berlangsung sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ditetapkan oleh menteri kehutanan. Sedangkan dalam pandangan Islam, kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan yang dilakukan oleh anggota Gapoktan Wana Tani lestari diperbolehkan. Dimulai dari aktivitas yang dilakukan masyarakat Gapoktan Wana Tani Lestari dalam hal memperoleh dan menetapkan lahan garapan mereka. dalam pandangan ekonomi Islam kegiatan pembukaan lahan baru maupun pemindahan hak pengelolaan melalui jual beli hak usaha dianggap sah dan diperbolehkan, dengan kegiatan tersebut masyarakat memperoleh hak untuk mengelola dan memanfaatkan hasil yang didapat dari tanah tersebut tetapi tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah tersebut. Adapun mekanisme pengelolaannya Islam tidak memberi aturan yang ketat dalam setiap dan semua persoalan sehingga akan menghalangi kebebasan bertindak manusia. Sebaliknya, sebagian besar masalah yang berkenaan dengan hal ini diserahkan kepada pertimbangan akal manusia disepanjang waktu dan tempat untuk menetapkan, sesuai dengan situasi sosial-

ekonomi yang senantiasa berubah, sama halnya dengan pandangan Islam, pada praktik dilapangan pemerintah juga menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat bagaimana mereka akan mengelola hutan tersebut guna memberi manfaat bagi kesejahteraan selama hutan tersebut dikelola secara lestari. Berdasar uraian di atas, maka dapat penulis simpulkan secara keseluruhan bahwasanya pengelolaan hutan kemasyarakatan yang dilakukan anggota Gapoktan wana Tani Lestari telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga di pebolehkan dalam pandangan ekonomi Islam, selama masyarakat Gapoktan Wana tani lestari tetap menjaga hutan agar tetap lestari.

2. Pengelolaan hutan kemasyarakatan oleh masyarakat Gapoktan HKm wana Tani Lestari membawa peningkatan terhadap kesejahteraan mereka. Akan tetapi hanya 20% dari jumlah responden yang telah memenuhi kriteria keluarga sejahtera II. Peningkatan kesejahteraan ini terbukti dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dalam kurun waktu 3 tahun belakangan. Peningkatan pendapatan tersebut berdampak pada peningkatan konsumsi makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan serta kebutuhan sekunder lainnya sehingga diikuti pula meningkatnya seluruh sektor perekonomian seperti perdagangan dan jasa. Msebesar 45% masyarakat telah mampu menyisihkan uang untuk berjaga-jaga (*saving*) Peningkatan kesejahteraan ini tidak terlepas dari karunia Allah SWT yang telah menganugerahi masyarakat Gapoktan Wana Tani Lestari dengan tanah hutan yang subur, kesehatan lahir dan batin kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengelola dan menghasilkan panen yang mencukupi, akan tetapi masyarakat

Gapoktan HKM wana tani lestari masih belum memiliki kesadaran untuk membayar zakat mal atas hasil panen mereka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas, sebagai upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pengelolaan hutan kemasyarakatan, adapun saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan baik bagi masyarakat pengelolahutan kemasyarakatan maupun dinas kehutn yang tergabung dala KPH Batutegei adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberi pendampingan dan pelatihan secara intensif kepada masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan mengenai cara pengelolaan dan pemanfaat hutan bahari agar tujuan dari pemanfaat hutan benar-benar terwujud, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan hutan lestari.
2. Bagi masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan, agar dapat meningkatkan keahlian dan etos kerja dalam mengelola dan memanfaatkan tanah karunia Tuhan dengan baik tanpa menimbulkan kerusakan guna masa depan mendatang mengingat jangka waktu yang diberikan pemerintah cukup lama yakni 35 tahun. Hendaknya masyarakat meningkatkan tabungan mereka guna cadangan masa depan sebelum izin pengelolaan hutan kemasyarakatan berakhir setra menggalakan pembayaran zakat bagi hasil panen yang telah mencapai nisabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Adiwarman Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- _____. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Redi. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Dodik Ridho Nurrochmat. *Strategi Pengelolaan Hutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadi, Sutisno. *Metodelogi Reseach*. Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2004
- Ija Suntana. *Politik Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ke-Empat. Jakarta: PT Gramedia Utama, 2011.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodelogi Research*. Bandung: ALUMNI, 1998.

- M. Quraish shihab. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudh'I atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Moehar Daniel. *Metodelogi Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Mohammad Prabudu Tika. *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mohammad Umer Chapra. *Towards A Just Monetary System* (Alih bahasa Ikhwani Abidin Basri *Sistem Moneter Islam*). Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Muhammad Baqir ash sadr. *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*. Jakarta: Zahra, 2008.
- Muhammad Sharif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Rudy Badrudin. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.
- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Soetomo. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam perspektif masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Sukanto Reksohadiprodjo dan Pradono. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi*. Yogyakarta: BPFE, 2007.
- Sumardi Suryabrata. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Supriadi. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Tony Wijaya. *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Veitzal Rifai dan Andi Buchari. *Islamic Economic*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009

Skripsi

Presia Listan Nova. *Analisis Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Skripsi, 2015)

Internet

Batasan dan Pengertian Kesejahteraan” (On-Line), Tersedia di:
<http://aplikasi.bkkbn.go.id>

Harlen Sopar. ”Efektivitas Hutan Kemasyarakatan Sebagai Wujud Kolaborasi Pengelolaan Hutan”. (On-Line), Tersedia di <http://responsitory.ipb.ac.id>

Ilyas Alimudin, ”Kesejahteraan Dalam Islam” (On-Line), tersedia di:
<http://makassar.tribunnews.com>

Konsep dan Devinisi Komposisi Pengeluaran Masyarakat (On-Line), Tersedia di:
www.bps.go.id

Peraturan Menteri Kehutanan” (On-Line), Tersedia di: www.hpli.org (2 April 2015).

Undang-undang

Peraturan menteri kehutanan No: P.37/MenHut-II/2007

Undang-undang Kesejahteraan sosial 2009 (UU RI No. 11 Th. 2009)